

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAL I TAHUN 2023



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.H Ahmad dahlan No. 73, Lamongan 62211
Telp. (0322) 321021-324945, Fax. (0322) 318663, E-mail: disdik@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, Maret 2023

Nomor : 700/ /413.101/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan I Tahun 2023 Dinas
Pendidikan Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Ir. MUNIF SYARIE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. K.H Ahmad dahlan No. 73, Lamongan 62211

Telp. (0322) 321021-324945, Fax. (0322) 318663, E-mail: disdik@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 700/ /413.101/2023
TANGGAL TERBIT : Maret 2023

Disiapkan Oleh	:	Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani Perencanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan <u>SUYONO</u> NIP. 19721120 200901 1 004
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan <u>ARIS NUR RAKHMAYANI, SE., Makt</u> NIP. 19840425 201101 2 016
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan <u>Ir. MUNIF SYARIE, MM</u> <u>NIP. 19650630 199202 1 002</u>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;

- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama sekolah menurun	RSO.23.01.25.01	10	Kepala Dinas Pendidikan	Mahalnya biaya Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi	Banyak peserta didik tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
2	Dinas Pendidikan	Guru yang bersertifikat pendidik belum mencapai 100%	RSO.23.01.25.03	15	Guru	1. Kualifikasi belum S1/D4 2. Ijasah yang tidak linear 3. Belum masuk di aplikasi Dapodik	1. Banyak guru yang tidak terima Tunjangan Sertifikasi guru 2. Kompetensi guru menurun
3	Dinas Pendidikan	Angka Rata-Rata Harapan Lama sekolah menurun	RSO.23.01.25.02	10	Dinas Pendidikan	Fasilitas Pendidikan belum terpenuhi secara merata	Banyak anak di daerah terpencil tidak menerima layanan pendidikan
4	Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Turun	RSO.23.01.25.04	11	Kepala Dinas Pendidikan	Tidak tercapainya target Indikator Kinerja Utama	Hasil/realisasi kinerja dibawah sta

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I.

(lampiran, form 10 dari simario)

Not secure simario.lamongankab.go.id/user/kertas-kerja/3/penilaian-kegiatan/dinas/9/review

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Search now

Simpulan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Dinas Pendidikan / Penilaian Kegiatan (RTP CEE) / Review

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Masih ada beberapa Pegawai yang Kurang patuh terhadap Peraturan yang berlaku	1. Melakukan revisi kode etik yang sudah ada di lingkungan Dinas Pendidikan dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas Pendidikan 2. Sosialisasi kode etik di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Lamongan	Kepala Dinas Pendidikan	Jan - Juni 2023
2	Belum Optimalnya Implementasi Analisis jabatan dan pengembangan pegawai sesuai Kompetensinya	1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi	Kepala Dinas Pendidikan	Jan - Juni 2023
3	1. Kebijakan Penetapan Manajemen resiko belum berjalan efektif 2. Penetapan Manajemen Berbasis Kinerja Pada setiap Individu belum berjalan dengan baik	1. Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko 2. Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	kepala Dinas Pendidikan	Juli - Des 2023
4	1. Masih adanya Ketidakjelasan Tupoksi pada masing-masing posisi di organisasi 2. Kurang kesadaran akan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi	1. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi utama pada masing-masing posisi 2. Menyusun ikhtisar Tugas pokok dan fungsi organisasi pada Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	Maret - Mei 2023
5	1. Masih ada wewenang yang tidak tepat dalam pendelegasian 2. Masih ada pegawai yang tidak memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan	1. Melakukan review dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur dibawahnya 2. melakukan komunikasi tentang wewenang dan tanggung jawab kepada pegawai secara jelas 3. Melaksanakan proses dan tingkatan otorisasi sesuai dengan ketentuan	Kepala Dinas Pendidikan	Juli - Oktober 2023
6	1. Masih belum optimalnya supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai untuk memastikan pegawai melaksanakan tugas kewajibannya sesuai dengan standar mutu dan prosedur yang sudah ditetapkan 2. Perekrutan Pegawai yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan Organisasi	Pemutakhiran Semua kebutuhan dan membantu pegawai dengan menyediakan akses pada kebutuhan alat maupun pelatihan yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran mereka	Kepala Dinas Pendidikan	April - Okto 2023
7	belum dilaksanakan secara optimal hasil dari masukan, saran, rekomendasi hasil pengawasan intern berkualitas.	Memperkenalkan APIP pada ASN di lingkungan Dinas Pendidikan karena sebagian besar ASN dit lingkungan belum memahami akalau mereka setiap tahunnya di review	Kepala dinas Pendidikan	Mei - juli 2023
8	1. Masih kurang Komunikasi dan Koordinasi dengan Instansi lain 2. Kurangnya kegiatan rekonsiliasi antar instansi	Manambah frekuensi komunikasi dan koordinasi terutama saat ada rapat bersama	Kepala Dinas Pendidikan	Sep - des 2023

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

Not secure simario.lamongankab.go.id/user/kertas-kerja/3/penilaian-kegiatan/risk/dinas/9/review

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Search now

Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:

1	Terlambatnya data Peserta didik yang berhak menerima	ROO.23.01.25.01	Melakukan sosialisasi lebih awal ke semua satuan Pendidikan	Informasi yang lambat diterima	Melakukan Koordinasi dengan kepala satuan Pendidikan	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetaraa	Agustus i 2023
2	Kegiatan Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.23.01.25.02	Memproses berkas administrasi yang sudah lengkap dikerjakan tanpa menunggu terkumpul semua	Administrasi masih ada yang kurang	Menghimbau satuan pendidikan agar secepatnya mengumpulkan berkas	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetaraa	Agus - Sep 2023
3	Laporan Realisasi Keuangan mengalami Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan tidak tepat waktu	ROO.23.01.25.03	Mengawasi mengerjakan laporan dengan dokumen yang sudah ada terlebih dahulu	Tidak dilakukan prosedur Tindak Pengendalian secara baik	Melakukan pengumpulan dokumen dari satuan pendidikan tepat waktu	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Sep - Okt 2023
4	Kegiatan Pembangunan sarpras baru tidak tepat sasaran	ROO.23.01.25.04	Mengidentifikasi dan survei ke satuan pendidikan untuk ditetapkan sebagai sasaran	data diperoleh dari DAPODIK saja	1. Melakukan Survei lapangan 2. Perbaikan data sarpras di dapodik	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Feb - Mart 2023
5	Realisasi Kualitas sarpras tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang sudah ditentukan	ROO.23.01.25.05	Selalu monitoring saat pelaksanaan	Kurang Faham akan Juknis	Membuat Berita acara Perubahan Spesifikasi dan anggaran	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Juli - Des 2023
6	Pelaporan kegiatan Pembangunan Sarpras baru yang tidak sesuai dengan juknis dan realisasi	ROO.23.01.25.06	Harus memahami terhadap Juknis Pelaporan	Kontraktor mengalami kerugian	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Okt - Des 2023
7	Alokasi anggaran untuk Rehabilitasi Ruang Kelas tidak Sesuai Dengan Kebutuhan	ROO.23.01.25.07	Kerjasama dengan konsultan dalam rencana penganggaran	Keterbatasan anggaran	Melakukan penghitungan secara cermat	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Jan - April 2023
8	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan Perlengkapan siswa	ROO.23.01.25.08	Mempercepat pendataan pada siswa yang berhak menerima	Pencairan anggaran telat	Melakukan Pendataan pada awal masuk	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Agst - September 2023
9	Jumlah Dana BOS /BOP Tidak sesuai dengan jumlah siswa ril di satuan pendidikan	ROO.23.01.25.09	Penginputan data Siswa dan sinkron dapodik sebelum Cut Off 31 Agustus	Data tidak valid di Dapodik	Monitoring dan Update Data Dapodik Secara Periodik dan perbaikan kapasitas operatos Dapodik	Kepala Dinas dan Kepala Sekolah	Agustus 2023
10	Adanya transaksi yang tidak dapat di pertanggung jawabkan	ROO.23.01.25.10	Pembinaan dan Pendampingan ke satuan Pendidikan	Juknis sulit di fahami	Melakukan Monev ke satuan pendidikan	Kepala Dinas dan Kepala Sekolah	Jan - Des 2023
11	Pelaporan melebihi batas waktu	ROO.23.01.25.11	Sosialisasi dan pendampingan ke satuan pendidikan	Banyak dokumen yang belum terpenuhi	Melakukan Monev ke satuan pendidikan	Kepala Dinas dan Kepala Sekolah	Nov - des 2023
12	Pendataan Kompetensi dasar yang masuk ke dalam struktur kurikulum muatan lokal tidak sesuai	ROO.23.01.25.12	Mengidentifikasi Kompetensi Dasar yang sesuai	Tim Penyusun tidak berkompeten di bidangnya	Melakukan pelatihan terhadap Tim Penyusun kurikulum MULOK	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Jan - Jun 2023

13	Tenaga Pendidik dan kependidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi dibawah standar	ROO.23.01.25.13	Memberikan Bea siswa untuk melanjutkan ke S1/D4	Terbatasnya anggaran	Melakukan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kabid GTK	Jan - Des 2023
14	Realisasi barang/jasa dengan spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi yang diatur dalam kontrak	ROO.23.01.25.14	Memperbaiki kualitas perencanaan secara cermat saat pengadaan barang/jasa	Menyesuaikan realisasi anggaran	Membuat Berita Acara perubahan spesifikasi.	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kasubag Umum	Jan - Des 2023
15	Penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu	ROO.23.01.25.15	Menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan Lebih dulu	Pencairan anggarann yang telat	Menghimbau kepada pemegang anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan	1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kasubag Keuangan	April, Juli, Okt-Jan 2024
16	Ketimpangan nilai mutu kelulusan peserta didik tingkat Pendidikan dasar	ROO.23.01.25.16	1. Distribusi guru yang merata 2. Pengadaan fasilitas pendidikan di daerah terpencil	Pergantian Kurikulum	Penambahan fasilitas Pendidikan	1. Kepala Dinas, 2. Kabid SD, 3. Kabid SMP 4. Kabid PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetara	Jan - Des 2023
17	Tidak cair tunjangan sertifikasi guru tersebut	ROO.23.01.25.17	Data guru yang valid melalui Dapodik	Ijasa yang tidak linier	Perbaikan data di Dapodik	1. Kepala Dinas 2. Kabid GTK	Jan- Des 2023
18	Indeks Didtribusi guru tidak merata	ROO.23.01.25.18	Distribusi guru sesuai analisis kebutuhan Guru	Penumpukan guru di perkotaan	Melakukan Pendataan analisis kebutuhan guru	1. Kepala Dinas 2. Kabid GTK	Jan- Des 2023

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, terjadinya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

The screenshot shows the 'Infokom' web application interface. The main content area displays a 'Formulir Kertas Kerja' form with the following details:

- Nama Pemda:** Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Tahun Penilaian:** 2023
- Tujuan Strategis Pemda:**
- Urusan Pemerintahan:** Pendidikan
- Dinas Terkait:** Dinas Pendidikan

Below the form is a table titled 'Formulir Kertas Kerja' with the subtitle 'Pengkommunikasian Pengendalian Yang Dibangun'. The table has 8 columns: No, Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan, Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian, Penyedia Informasi, Penerima Informasi, Rencana Waktu Pelaksanaan, Realisasi Waktu Pelaksanaan, and Keterangan.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Pendataan usia sekolah dari keluarga miskin	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala satuan Pendidikan dan Masyarakat Umum	Mei - september 2023	-September 2023	-
2	melakukan validasi data guru lewat Dapodik	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala satuan Pendidikan dan PTK	Jan dan Juli 2023	3 Juli 2023	-Rilis Dapodik Baru 2023/204
3	1. Pendataan Siswa dari Keluarga Miskin 2. Perbaikan dan penambahan fasilitas Pendidikan	Rapat Sosialisasi, surat perintah, surat edaran, Web site Dinas	Dinas Pendidikan	Kepala satuan Pendidikan dan Masyarakat Umum	Juli - des 2023	-	-
4	Mengadakan pelatihan Peningkatan kompetensi Pegawai	Rapat sosialisasi, surat Tugas	Dinas Pendidikan	Pegawai Dinas Pendidikan	Jan - Des 2023	5 Juli 2023	-
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:							
1	Melakukan Koordinasi dengan kepala satuan Pendidikan	Rapat koordinasi, surat perintah, surat	Dinas	Kepala Sekolah	Jan - Des 2023	Mei 2023	-

2	Menghimbau satuan pendidikan agar secepatnya mengumpulkan berkas	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Jan - Des 2023	-	-
3	Melakukan pengumpulan dokumen dari satuan pendidikan tepat waktu	surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Jun - Des 2023	-	-
4	1. Melakukan Survei lapangan 2. Perbaikan data sarpras di dapodik	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Mar - Des 2023	Maret 2023	Pemutakhiran Data Sarpras Dapodik Untuk DAK
5	Membuat Berita acara Perubahan Spesifikasi dan anggaran	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kontraktor Pengadaan Sarpras	Juli - Des 2023	-	-
6	Melakukan Monitoring dan Evaluasi	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kontraktor Pengadaan Sarpras	Juli - Des 2023	-	-
7	Melakukan penghitungan secara cermat	Rapat koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Konsultan Pengadaan Sarpras	Jan - Juni 2023	Juni 2023	-
8	Melakukan Pendataan pada awal masuk	Rapat Sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Juli - Des 2023	Juli 2023	Pemutakhiran data Lewat Dapodik
9	Monitoring dan Update Data Dapodik Secara Periodik dan perbaikan kapasitas operatos Dapodik	Rapat Sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Jan - Des 2023	Juli 2023	-
10	Melakukan Monev ke satuan pendidikan	Rapat Koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Juli - Des 2023	-	-
11	Melakukan Monev ke satuan pendidikan	Rapat Koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Juli - Des 2023	Maret 2023	-
12	Melakukan pelatihan terhadap Tim Penyusun kurikulum MULOK	Rapat sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	TIM Penyusun Kurikulum	Juli - Des 2023	Mei 2023	--
13	Melakukan Pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru	Rapat sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala sekolah	Juli - Des 2023	Mei 2023	-
14	Membuat Berita Acara perubahan spesifikasi.	Rapat Koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kasubag Umum	Juli - Des 2023	-	-
15	Menghimbau kepada pemegang anggaran untuk secepatnya membuat realisasi laporan	Rapat Koordinasi, surat perintah, surat edaran, Nota Dinas	Dinas Pendidikan	Kasubag Keuangan	Juli - Des 2023	-	-
16	Penambahan fasilitas Pendidikan	Rapat Koordinasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kasi sarpras	Jan - Des 2023	Juni 2023	-
17	Perbaikan data di Dapodik	Rapat Sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Jan - Des 2023	Februari 2023	-
18	Melakukan Pendataan analisis kebutuhan guru	Rapat Sosialisasi, surat perintah, surat edaran	Dinas Pendidikan	Kepala Sekolah	Jan - Des 2023	April 2024	-

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan harus mendapat perhatian secara khusus terhadap dampak yang akan terjadi dikemudian hari, dan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan *time management* atau pengelolaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga target keberhasilan kegiatan dapat diraih.